



Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Dewi Intan Permatasari ¹, Firsty Ramadhona Amalia Lubis ^{2,*}

¹ Universitas Ahmad Dahlan; dewi1900010076@webmail.uad.ac.id

² Universitas Ahmad Dahlan; firsty.ramadhona@ep.uad.ac.id

Abstrak: Pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran manusia dalam mengelolanya. Manusia merupakan tenaga kerja, input pembangunan, juga merupakan konsumen dari hasil pembangunan itu sendiri. Permasalahan pokok dalam ketenagakerjaan Indonesia terletak pada tingkat kesempatan kerja. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak terlepas dari masalah masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Indonesia adalah pesatnya peningkatan jumlah angkatan kerja. Indonesia yang merupakan negara berkembang adalah merupakan satu dari banyak negara yang memiliki masalah mengenai tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Upah Minimum Regional, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia dan Inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi pulau Jawa periode tahun 2017-2021. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggunakan software eviews 10. Data yang digunakan adalah data sekunder tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan PDRB dan Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Kemudian secara simultan Upah Minimum Provinsi, Produk Domestik Regional Bruto, dan Investasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi pulau Jawa.

Keywords: *Penyerapan Tenaga Kerja, Upah Minimum Provinsi, Produk Domestik Regional Bruto, dan Investasi.*

*Correspondence: Firsty Ramadhona
Amalia Lubis
Email: firsty.ramadhona@ep.uad.ac.id

Received: date
Accepted: date
Published: date



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Economic development cannot be separated from the role of humans in managing it. Humans are labor, inputs of development, also consumers of the results of development itself. The main problem in Indonesian employment lies in the level of employment opportunities. Indonesia as one of the developing countries cannot be separated from problems related to employment. The labor problem faced by Indonesia is the rapid increase in the number of labor force. Indonesia, which is a developing country, is one of many countries that have labor problems. This study aims to analyze and determine the effect of Regional Minimum Wage, Gross Regional Domestic Product, Human Development Index and Inflation on labor absorption in Java island province for the 2017-2021 period. The analysis method used in this study was panel data regression using eviews 10 software. The data used is annual secondary data sourced from the Indonesian Central Bureau of Statistics (BPS). The results showed that partially UMP had a negative and significant effect on employment, while GRDP and Investment had a positive and significant effect on labor absorption. Then simultaneously the Provincial Minimum Wage, Gross Regional Domestic Product, and Investment have a significant effect on employment in Java island province.

Keywords: Employment, Provincial Minimum Wage, Gross Regional Domestic Product, and Investment.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi, diukur dari perubahan aspek lain dalam perekonomian seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, perkembangan kemahiran tenaga kerja, dan kenaikan taraf dalam kemakmuran masyarakat. Pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah pada dasarnya merupakan suatu proses dimana hubungan antara berbagai variabel diantaranya sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, modal dan lain-lain. Salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan dalam pembangunan adalah melaksanakan pembangunan itu sendiri dengan para pekerja khususnya dengan tenaga kerja penduduk Indonesia mencapai sebesar 264 jiwa pada tahun 2017. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran manusia dalam mengelolanya, dimana manusia merupakan tenaga kerja, pelaku pembangunan dan konsumen dari hasil pembangunan ekonomi itu sendiri (Sukirno, 2013).

Keberhasilan ekonomi pembangunan di negara berkembang dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kesempatan kerja. Indonesia juga sebagai negara berpendudukan terbesar kelima di dunia, dengan jumlah penduduk sebesar 264 juta jiwa pada tahun 2017, serta negara yang memiliki sumber daya manusia yang besar dan menjadi potensi besar dalam menggerakkan perubahan pembangunan ekonomi. Tujuan dari proses pembangunan adalah meningkatnya ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang-barang kehidupan pokok, meningkatnya standar hidup (penyediaan lapangan pekerjaan, dan perbaikan pendidikan) dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial. Perkembangan kesejahteraan suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara yang bergantung dengan kuantitas penduduk yang dihasilkan oleh tenaga kerja dan sebagian pada nilai atas produk tersebut. Pembangunan ekonomi juga merupakan serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk menggerakkan kegiatan ekonomi sebagai implikasi dari perkembangan mulai kesempatan kerja akan bertambah, tingkat penyerapan tenaga kerja meningkat dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi dalam perekonomian negara (Sukirno, 2006).

Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil bila diantaranya mampu menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan, bukan hanya bagi orang yang menganggur (pencari kerja), serta mereka yang sudah bekerja tetapi masih mencari pekerjaan. Kebijakan suatu daerah yang ramah ketenagakerjaan (*employment growth friendly*) harus didasarkan pada penggunaan momentum pertumbuhan ekonomi yang tepat. Jika

pembangunan ekonomi mempunyai prinsip penciptaan kesempatan kerja, niscaya salah satu masalah klasik ketenagakerjaan seperti pengangguran dapat dipecahkan. Penanggulangan masalah pengangguran dan pekerja miskin dapat dilakukan melalui upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga mampu menciptakan lebih banyak pekerjaan yang layak dan produktif.

Hingga saat ini, isu strategis ketenagakerjaan yang masih dihadapi prov Jawa Tengah adalah pengangguran, yang antara lain disebabkan (1) tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan penambahan kesempatan kerja, (2) terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, (3) masih rendahnya kualitas angkatan kerja, (4) kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang sesuai, dan (5) motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah.

Seiring melambatnya pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Jawa Tengah, juga turut terpengaruh oleh kondisi tersebut. kondisi ketenagakerjaan di Kab/Kota Prov Jawa Tengah dapat dilihat melalui tabel berikut

Tabel 1.1

Kondisi Umum Ketenagakerjaan Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa 2017-2021

Tahun	kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Angkatan Kerja (JUTA)	Penduduk Yang Bekerja (JUTA)	Persentase Antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk yang bekerja
2021	Kabupaten cilacap	83.004.300	74.732.900	90,03
2021	Kabupaten Banyumas	86.598.200	81.359.200	93,95
2021	Kabupaten Purbalingga	50.368.200	47.323.200	93,95
2021	Kabupaten Banjarnegara	49.974.100	47.046.000	94,14
2021	Kabupaten Purworejo	62.012.700	58.271.900	93,97

Tahun	kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Angkatan Kerja (JUTA)	Penduduk Yang Bekerja (JUTA)	Persentase Antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk yang bekerja
2021	Kabupaten Kebumen	41.529.900	40.040.100	96,41
2021	Kabupaten wonosobo	42.805.300	40.552.600	94,74
2021	Kabupaten Magelang	77.458.900	73.561.300	94,97
2021	Kabupaten Boyolali	58.994.100	55.993.200	94,91
2021	Kabupaten klaten	63.124.500	59.666.100	94,52
2021	Kabupaten Sukoharjo	49.325.800	47.686.700	96,68
2021	Kabupaten wonogiri	57.302.500	55.909.300	97,57
2021	Kabupaten Karanganyar	51.778.700	48.727.000	94,11
2021	Kabupaten Sragen	50.775.200	48.359.200	95,24
2021	Kabupaten Grobogan	78.303.500	74.871.800	95,62
2021	Kabupaten Blora	48.552.500	46.701.800	96,19
2021	Kabupaten Rembang	36.202.000	34.872.700	96,33
2021	Kabupaten Pati	69.442.700	66.249.200	95,40
2021	Kabupaten Kudus	52.109.400	50.144.300	96,23
2021	Kabupaten Jepara	68.728.400	65.820.800	95,77
2021	Kabupaten Demak	59.511.100	56.370.800	94,72
2021	Kabupaten Semarang	63.004.000	59.841.300	94,98
2021	Kabupaten Temanggung	45.492.700	44.300.900	97,38
2021	Kabupaten kendal	53.403.000	49.373.200	92,45
2021	Kabupaten Batang	43.069.000	40.232.000	93,41

Tahun	kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Angkatan Kerja (JUTA)	Penduduk Yang Bekerja (JUTA)	Persentase Antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk yang bekerja
2021	Kabupaten Pekalongan	48.624.800	46.546.000	95,72
2021	Kabupaten Pemalang	64.510.300	60.181.500	93,29
2021	Kabupaten Tegal	71.584.500	64.449.900	90,03
2021	Kabupaten Brebes	87.925.800	79.328.900	90,22
	Kota			
2021	Kota Magelang	6.608.600	6.031.700	91,27
2021	Kota Surakarta	28.217.800	26.002.500	92,15
2021	Kota Salatiga	11.212.400	10.397.900	92,74
2021	Kota Semarang	103.479.400	93.607.600	90,46
2021	Kota Pekalongan	18.121.000	16.872.500	93,11
2021	Kota Tegal	13.244.000	12.151.000	91,75

Sumber: data diambil dari Badan Pusat Statistik.

Tabel diatas menunjukkan data mengenai kondisi umum ketenagakerjaan kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2021. Terlihat dari data persentase tersebut bekerja mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Lebih dari 80 persen angkatan kerja di provinsi-provinsi yang ada di kab/kota provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 ialah penduduk yang bekerja dengan demikian Peningkatan angkatan kerja menunjukkan penawaran tenaga kerja di dalam pasar bertambah, namun penawaran tenaga kerja yang bertambah tidak selalu diiringi dengan permintaan tenaga kerja yang mampu menyerap angkatan kerja. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih banyaknya pengangguran di kab/kota Provinsi Jawa Tengah.

Penyerapan tenaga kerja memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi beberapa negara, terutama negara berkembang, termasuk Indonesia. Dengan terciptanya pembangunan ekonomi yang baik, suatu negara dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan ekonomi memiliki sebuah tujuan dalam penyediaan lapangan pekerjaan agar dapat mengikuti pertumbuhan dari jumlah penduduk hingga angkatan kerja, yang mana pertumbuhan jumlah penduduk lebih cepat daripada

pertumbuhan kesempatan atau lapangan pekerjaan. Manusia sebagai salah satu pelaku dari kegiatan pembangunan akan selalu terlibat dalam pembangunan ekonomi maupun pembangunan lainnya. Selain itu dengan kondisi penyerapan tenaga kerja yang baik, dapat membantu masalah ketenagakerjaan yaitu dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada dan dapat mengurangi kemiskinan dan kriminalitas yang ada.

Jumlah penduduk besar untuk beberapa hal bisa dianggap sebagai hal positif, dimana jumlah penduduk tersebut dapat menjadi subjek dalam pembangunan, perekonomian pun dapat berkembang apabila memiliki tenaga kerja yang banyak. Akan tetapi, hal tersebut bisa juga menjadi beban dalam pembangunan apabila lapangan kerja yang ada tidak sesuai atau seimbang dengan besarnya jumlah penduduk. Situasi tersebut hanya akan menimbulkan masalah dimana penduduk yang telah memasuki usia kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Ketersediaan lapangan kerja yang tidak cukup tersebut merupakan fenomena yang umumnya akan dihadapi dalam masalah ketenagakerjaan seiring bertambahnya angkatan kerja.

Indonesia termasuk salah satu dari berbagai negara yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang banyak. Dengan keadaan tersebut, Indonesia pastinya akan menghadapi masalah dalam tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan meningkat, bisa pula pertumbuhan angkatan kerja. Angkatan kerja yang terus meningkat harus dibarengi dengan peningkatan kesempatan kerja pula. Jumlah angkatan yang besar dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja hanya akan menimbulkan masalah yaitu berkurangnya kesempatan kerja, dan semakin banyak penduduk usia kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan.

Provinsi Jawa Tengah juga menghadapi berbagai masalah mengenai tenaga kerja. Selama tahun 2000 – 2021, tenaga kerja provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2000 hingga tahun 2021, jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik Prov Jawa Tengah, tingkat partisipasi tenaga kerja tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 69,11 persen, keadaan ini terjadi tidak lepas dari adanya peran pemerintah dalam mengawasi dan melakukan pengelolaan terhadap berbagai masalah mengenai ketenagakerjaan yang ada di provinsi Jawa Tengah. Tingkat partisipasi angkatan tenaga kerja terendah terjadi di tahun 2015. Pada tahun 2015, menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah tingkat partisipasi tenaga kerja tercatat sebesar 67,87 persen. Namun setelah itu tingkat partisipasi tenaga kerja terus mengalami fluktuasi pada tahun-tahun sebelumnya. Fluktuasi ini disebabkan oleh salah satu faktor dalam perekonomian yaitu kondisi sumber daya manusia yang rendah, disertai dengan pertumbuhan penduduk yang terus bertambah.

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan naik dan turunnya kondisi penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah seperti, kondisi dari pertumbuhan ekonomi, upah, PDRB, pendidikan, investasi, dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu perkembangan situasi ekonomi suatu negara melalui perubahan aktivitas ekonomi dalam menghasilkan suatu komoditi dan pada jangka waktu tertentu. Dalam pertumbuhan ekonomi juga memerlukan unsur investasi. Investasi sebagai salah satu faktor produksi merupakan faktor yang sangat penting dalam peningkatan kapasitas produksi ataupun jumlah industri. peningkatan investasi ini sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap hasil produksi baik permintaan dari dalam negeri. Permintaan tersebut merupakan pasar dan hal ini berpengaruh pada jumlah tenaga kerja dalam kegiatan produksi, (Dharma & Djohan, 2015).

Menurut Arin Luthita Anna Mathovani (2019), PDRB menjadi cerminan dari pertumbuhan ekonomi, jika PDRB mengalami peningkatan maka kesempatan kerja juga akan meningkat. PDRB dapat mempengaruhi situasi ketenagakerjaan dengan asumsi bahwa jika nilai PDRB meningkat, jumlah penjualan atau produksi di berbagai unit ekonomi juga akan meningkat. Jika hasil produksi perusahaan meningkat, maka penambahan tenaga kerja dapat dilakukan oleh perusahaan guna agar kegiatan produksi dapat mengikuti peningkatan penjualan.

Menurut Atifatur (2018) upah adalah imbalan dari hasil kerja yang dilakukan seseorang kepada perusahaan. Meningkatnya upah ditandai dengan adanya kenaikan jumlah permintaan barang dan jasa, oleh sebab itu naiknya jumlah permintaan barang dan jasa dapat menyebabkan jumlah dari produksi dapat meningkat, yang pada akhirnya dapat menyebabkan peningkatan jumlah tenaga kerja yang diperlukan oleh perusahaan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan yang merupakan aturan turunan dari undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Upah Minimum Provinsi (UMP) yang didasari oleh kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, yaitu meliputi tingkat daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah, di mana penyesuaiannya dilakukan setiap tahun. Penyesuaian upah minimum ditetapkan pada rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah upah minimum pada wilayah yang bersangkutan. Dalam hal UMP tahun berjalan lebih tinggi dari batas atas UMP Meningkatnya upah ditandai dengan adanya kenaikan jumlah permintaan barang dan jasa, oleh sebab itu naiknya jumlah permintaan barang dan jasa dapat menyebabkan jumlah dari produksi dapat meningkat, yang pada akhirnya dapat menyebabkan peningkatan jumlah tenaga kerja yang diperlukan oleh perusahaan. Selain kebijakan menaikkan upah, banyak beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk menangani masalah ketenagakerjaan yaitu dengan melakukan

investasi, karena investasi secara tidak langsung juga dapat menaikkan kapasitas produksi dengan meningkatnya jumlah produksi yang dihasilkan tentu akan berdampak pada penambahan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Menurut teori Keynes mengatakan bahwa cara mengurangi pengangguran yaitu dengan memperbanyak investasi misalnya mesin karena mesin membutuhkan operator sehingga secara langsung ataupun tidak akan menyerap tenaga kerja dan dapat membuka lapangan pekerjaan baru.

Menurut Syahyunan (2015), investasi adalah perjanjian pemberian sejumlah modal atau dalam bentuk sumber daya lain yang telah disepakati pada saat itu juga, dengan memiliki tujuan dalam memperoleh laba atau pendapatan dimasa mendatang. Kehadiran investasi mampu menciptakan sebuah modal baru bagi perusahaan sehingga dapat menghasilkan atau menambah faktor produksi yang baru seperti menciptakan lapangan kerja atau kesempatan kerja yang dapat menyerap angkatan kerja hingga membantu mengurangi pengangguran (Prasojo, 2009).

Upah minimum provinsi dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Upah berpengaruh terhadap kondisi dari permintaan dan penawaran tenaga kerja. Upah minimum merupakan pedoman bagi pengusaha dalam membayar upah kepada karyawannya. Upah minimum di suatu provinsi ditentukan oleh dewan pengupah, yang terdiri dari gubernur masing-masing provinsi. Tingkat upah merupakan salah satu alasan atau faktor penting bagaimana seseorang memberikan kontribusi terhadap pekerjaan yang dilakukannya...

Pada umumnya, upah minimum dan kesempatan kerja di tiap daerah berbeda beda. Karena hal tersebut, seseorang akan mencari daerah dan berpindah tempat, dimana terdapat pekerjaan dengan upah yang dirasa cukup besar dan layak hingga dapat memenuhi kebutuhannya. Namun hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya penumpukan penduduk usia kerja yang mencari pekerjaan di suatu tempat, sehingga kesempatan kerja yang ada menjadi berkurang. Oleh sebab itu, peran pemerintah sangatlah dibutuhkan yaitu dengan mengupayakan menciptakan lapangan pekerjaan secara merata di Indonesia.

Adapun besaran perkembangan dari upah minimum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2017-2021 dari tahun 2016 hingga 2019 yang didapatkan dari BPS Provinsi Jawa Tengah, perkembangan UMP di Prov Jawa Tengah tiap tahunnya meningkat. Peningkatan ini dapat dikatakan cukup pesat, dimana pada tahun 2016 berkisaran sebesar Rp.1.265.000 dan terus meningkat sampai pada tahun 2019 sebesar Rp.1.605.396. Dewan Pengupah harus lebih memperhatikan situasi para tenaga kerja secara keseluruhan dan berbagai faktor

produksi untuk menetap upah yang baik. Terdapat sebuah pernyataan dari Gie (1999: 569) menyatakan bahwa harus adanya batasan minimum upah para buruh, negara berkembang tidak dapat sewenang wenang untuk menentukan upah buruh serendah mungkin.

Pada umumnya upah akan terus mengalami kenaikan seiring semakin canggih dan berkembangnya zaman yang mengakibatkan naiknya harga barang dan jasa serta biaya hidup yang semakin besar. Tingkat upah minimum provinsi yang tinggi dapat menjadi alasan yang menyebabkan berkurangnya penyerapan tenaga kerja. Di sisi pencari kerja, semakin tinggi upah minimum di suatu daerah, semakin banyak pencari kerja yang berusaha mencari pekerjaan di daerah tersebut. Namun jika dari sisi perusahaan, penetapan tingkat upah yang tinggi dapat menjadi salah satu alasan bagi perusahaan untuk membatasi tenaga kerjanya.

Jika tingkat upah meningkat maka akan menaikkan biaya produksi dan secara tidak langsung juga akan meningkatkan biaya hasil produksi. Hal tersebut akan mempengaruhi daya beli konsumen, sehingga konsumen akan mengurangi mengkonsumsi barang tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan akan memilih untuk mengurangi dan membatasi dalam penyerapan tenaga kerja dibutuhkan (Sumarsono, 2009). Dan sebaliknya jika upah menurun, maka penyerapan tenaga kerja akan menjadi bertambah. Namun kondisi tersebut juga akan memaksa seseorang untuk memenuhi kebutuhan dengan mencari dan memperoleh pekerjaan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa upah minimum memiliki hubungan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Latri Wihastuti dan Heni Rahmatullah,(2018) yang mana hasilnya menunjukkan bahwa upah minimum provinsi bersifat negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Fransisca Natalia Sihombing (2017), terdapat hasil yang berbeda dimana dalam penelitiannya upah minimum memiliki hubungan positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Medan.

Dalam upaya untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan, pemerintah memberikan perhatian lain terhadap suatu hal yaitu PDRB, yang merupakan jumlah dari nilai tambah bruto yang diciptakan oleh semua sektor ekonomi di suatu daerah. PDRB dapat mempengaruhi jumlah dari angkatan kerja untuk bekerja. Hal ini dapat terjadi apabila diasumsikan nilai PDRB meningkat, sehingga dapat diartikan bahwa terjadinya peningkatan terhadap nilai output penjualan dari berbagai unit sektor perekonomian di suatu wilayah. Semakin tinggi jumlah penjualan, maka perusahaan akan berusaha untuk merekrut tenaga kerja agar mampu mengiringi jumlah produksi yang meningkat

dikarenakan penjualan yang meningkat.

Menurut Habiburrahman (2012), Kenaikan PDRB mempunyai kemampuan yang besar dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja serta mampu menunjukkan lapangan kerja/kesempatan kerja yang lebih luas. Kemudian berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan teori Keynes dalam Boediono (1998), menyatakan bahwa pasar tenaga kerja mengikuti apa yang terjadi di pasar barang.

Pada Provinsi Jawa Tengah, perkembangan PDRB baik atas dasar harga berlaku tiap tahunnya mengalami kenaikan, sebelumnya pada tahun 2019 nilai PDRB sekitar 28,2 juta dan tahun 2020 PDRB Jawa Tengah turun menjadi 26,1 juta, pada tahun 2019 PDRB tertinggi. Kondisi ini disebabkan karena lumpuhnya berbagai macam lapangan usaha selama situasi pandemi covid-19 mengakibatkan terjadinya pembatasan sosial berskala besar atau biasa dikenal dengan PSBB dan berbagai macam aturan pemerintah untuk menanggulangi covid-19.

Dari latar belakang untuk mengetahui apakah ada pengaruh upah minimum Kabupaten/Kota, PDRB dan investasi terhadap Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Sumatera Barat, maka peneliti membahas mengenai “ Pengaruh Upah Minimum, PDRB, dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2017-2021”.

METODE PENELITIAN

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah estimasi data panel. Data panel yaitu model ekonometrika yang menyatukan antara deret waktu (time series) dan data kerat lintang (cross section), sehingga dalam data panel jumlah observasi merupakan hasil kali observasi deret waktu ($T > 1$) dengan observasi kerat lintang ($N > 1$). Dalam melakukan analisis, data panel dapat dibedakan menjadi dua yaitu balance panel data dan unbalance panel data. Balance panel data terjadi jika panjangnya waktu untuk setiap unit cross section sama. Sedangkan unbalanced panel data terjadi jika panjangnya waktu tidak sama untuk setiap unit cross section (Gujarati, 2012: 238).

Kombinasi data time series dan cross section dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas data dengan pendekatan yang tidak mungkin dilakukan dengan menggunakan hanya salah satu dari data tersebut. Analisis data panel dapat mempelajari sekelompok subjek jika kita ingin mempertimbangkan baik dimensi data maupun dimensi waktu. Menurut Baltagi (dalam Gujarati, 2012: 237).

$$\ln PTK_{it} = \beta_0 + \ln \beta_1 UMP_{it} + \ln \beta_2 PDRB_{it} + \ln \beta_3 I_{it} + e_{it}$$

Ketenaga kerjaan merupakan variable dependen dalam penelitian ini yang dinyatakan dalam satuan jiwa Sedangkan, untuk variable independent berupa Upah Minimum Provinsi (Rupiah), PDRB (juta), Investasi (juta).

Pengujian data panel dimulai dengan pemilihan model terbaik Widarjono (2013) yang dilakuakn dengan cara melakukan Uji Chow, Uji Hausman. Uji Chow dilakukan untuk menguji model Comman Effect dan Fixed Effect. Uji Hausman digunakan untuk menguji antara model Random Effect dan Fixed Effect. Sedangkan, Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik berupa uji heterokedastisitas dan multikolinieritas. Uji heterokedastisitas menggunakan *Breusch-Pagan/Cook and Weisberg's test* dimana dari hasil data olahan nilai $Prob > \chi^2$ kurang dari α maka model terdapat masalah heteroskedastisitas (Widarjono, 2013). Sedangkan, uji multikolinieritas dapat memanfaatkan VIF. Jika nilai VIF < 10 maka tidak ada efek samping multikolinieritas (Widarjono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif digunakan membagikan data tentang variabel upah minimum provinsi, produk domestik bruto, investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi jawa tengah. Berdasarkan uji spesifikasi model menggunakan uji Chow, nilai probabilitas yang kurang dari nilai signifikansi 5%, yaitu 0,0000 hal ini dapat menjelaskan bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect Model*. Dari uji Hausman menunjukkan angka probabilitas ialah sebesar 0,8893 nilai tersebut lebih besar dibanding tingkatan signifikansi sebesar 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima serta menolak H_1 , yang berarti model yang terbaik dalam penelitian ini merupakan *Random Effect Model*. Kedua uji menunjukkan pilihan terbaik menggunakan model efek tidak tetap (*Random Effect*).

Tabel 1. Pemilihan Model Terbaik

Test	Probabilitas	Hasil
Chow	0.0000	Random Effect
Hausman	0.8893	Random Effect

Sumber: *Data Diolah, 2023*

Variabel bebas dikatakan bebas dari *heteroskedastisitas* jika $Prob > \chi^2$ lebih besar dari 0,05. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai $Prob > \chi^2$ sebesar $0,0000 < 0,05$, yang berarti terdaot tanda-tanda *heteroskedastisitas*, tetapi dalam hal ini data disembuhkan dengan kuat dengan metode *robust*. Sedangkan, hasil Uji Multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai mean VIF Hasi uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai centered VIF kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinieritas antar variabel independent.

Tabel 2. Uji Multikolinieritas

Variabel	VIF	1/VIF
UMP	4186.28	0.737605

PDRB	1152.10	0.884194
INVESTASI	91.92	0.908942

Sumber: *Data Diolah, 2023*

Pengujian F-statistic menunjukkan nilai sebesar 0.023 lebih kecil dari 0,05. Sehingga, secara simultan variable independent mempengaruhi inklusi keuangan. Pada uji koefisien determinasi digunakan untuk menggambarkan hasil garis regresi yang dibentuk sesuai data. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai R^2 sebesar 0,2844. Artinya bahwa sebesar 28,44 persen variable inklusi keuangan di pengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan PMDN. Sementara itu, secara persial pada masing-masing variable menunjukkan hasil yang berbeda. Adapun hasil tersebut seperti pada Tabel 3 sebagai berikut.

1. Analisis Pengaruh UMP Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Dari hasil pengolahan data bisa diketahui bahwa variabel UMP di Provinsi Jawa Tengah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja yang ditunjukkan pada nilai koefisien sebesar -0.383202 dan nilai probabilitas sebesar 0.0019. Maka dapat disimpulkan bawasannya apabila terjadi kenaikan upah minimum provinsi sebesar 1 juta rupiah maka akan terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar -0.383202 jiwa di Provinsi Jawa Tengah. Pada sektor ini, jika upah minimum dinaikkan maka produsen akan menurunkan jumlah tenaga kerja. Fenomena di mana peningkatan upah menyebabkan penyerapan tenaga kerja turun dapat disebabkan oleh beberapa faktor ekonomi yang kompleks. Peningkatan upah berarti biaya produksi bagi perusahaan meningkat. Untuk mengimbangi kenaikan ini, perusahaan mungkin harus membatasi pengeluaran di bagian lain, termasuk pengurangan jumlah tenaga kerja atau menunda perekrutan. disisi lain Ketika biaya tenaga kerja meningkat, perusahaan mungkin lebih cenderung untuk mengotomatiskan proses produksi atau mencari cara-cara untuk meningkatkan efisiensi kerja. Hal ini bisa berarti mengurangi jumlah pekerja atau meningkatkan produktivitas dengan teknologi. Hal ini membuat banyak hasil produksi yang tidak terjual akibatnya perusahaan lebih memilih mengurangi jumlah produksi atau malah menurunkan harga produksinya. Pengurangan jumlah produksi ini pada akhirnya akan mengurangi tenaga kerja yang dibutuhkan (Yuda Pratama & Amaliah, 2022). Kenaikan upah memang dapat menaikkan kesempatan kerja melalui peningkatan konsumsi masyarakat, namun dalam beberapa kasus kenaikan upah juga dapat berdampak negatif bagi kesempatan kerja tersebut.

2. Analisis pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja

Dari hasil pengolahan data bisa diketahui bahwa variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja yang ditunjukkan pada nilai koefisien sebesar 0.519135 serta probabilitas sebesar 0.0004. Maka dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi kenaikan PDRB sebesar 1 triliun rupiah maka akan terjadi kenaikan penyerapan tenaga kerja sebesar 0.519135 jiwa di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut sesuai dengan teori yang ada, di mana PDRB berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Tinggi nya

PDRB di suatu wilayah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut juga tinggi dimana pertumbuhan yang tinggi akan mendorong produktivitas yang tinggi sehingga permintaan tenaga kerja di wilayah tersebut mengalami kenaikan seiring dengan tingginya jumlah barang yang diproduksi. Seperti teori yang diungkapkan oleh Keynes dalam Boediono (2014), bahwa pasar tenaga kerja hanyalah mengikuti apa yang terjadi di pasar barang, dalam hal ini PDRB akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja jika permintaan output suatu perusahaan naik. Apabila terjadi peningkatan nilai PDRB pada sektor – sektor ekonomi yang ada akan dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang akan tersedia. Dengan adanya pengembangan dan peningkatan sektor ekonomi akan mendorong dibukanya lapangan kerja yang baru. Tidak hanya untuk meningkatkan sektor ekonomi yang sedang berkembang saja, namun dengan dibukanya lapangan pekerjaan yang baru akan mengurangi jumlah pengangguran.

3. Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Dari hasil pengolahan data dapat diketahui bahwa variabel Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja yang ditunjukkan pada nilai koefisien 0.055307 dan nilai probabilitas sebesar 0.0372. Hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi kenaikan investasi sebesar 1 juta rupiah maka akan terjadi kenaikan penyerapan tenaga kerja sebesar 0.055307 jiwa di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan investasi yang dilakukan Abdul Haris Romdhoni (2017) menyatakan bahwa variabel investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah. Hal ini sesuai dengan teori dan penelitian sebelumnya bahwa adanya investasi akan mampu menyerap tambahan tenaga kerja. Investasi memainkan peran penting dalam menggerakkan kehidupan ekonomi bangsa, karena pembentukan modal memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional maupun menciptakan lapangan kerja baru, dalam hal ini akan semakin memperluas kesempatan kerja (Todaro, 2010). Investasi dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja karena perusahaan dapat menggunakan investasi untuk menambah penggunaan faktor produksi. Apabila perusahaan memilih menggunakan investasi yang ada untuk menambah faktor produksi tenaga kerja maka penyerapan tenaga kerja akan meningkat.

SIMPULAN

berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut hasil penelitian yang meliputi 23 Kabupaten dan 5 kota yang ada di provinsi Jawa Tengah periode 2017-2021 dengan menggunakan Random Effect Model (FEM) menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi berpengaruh negative signifikan, Produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh positif signifikan, dan Investasi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, variabel tersebut mampu menjelaskan variable

dependen yaitu Tenaga Kerja sebesar 21,6%. Sedangkan sisanya 78,4% dijelaskan oleh variable lain diluar model.

DAFTAR PUSTAKA

- Akyuwen, R., & Waskito, J. (2018). *Memahami Inklusi Keuangan*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Allen, F., Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., & Peria, M. S. (2016). The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts. *Journal of Financial Intermediation*, 27, 1-30. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jfi.2015.12.003>
- Banerjee, R., Donato, R., & Maruta, A. A. (2020). The Effect of Financial Inclusion on Development Outcomes: New Insights from ASEAN and East Asian Countries. *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia*, 342, 1-53.
- Beck, T., Demirguc-Kunt, A., & Levine, R. (2007). Finance, Inequality and The Poor. *Journal of Economic Growth*, 12(1), 27-49. doi:<https://doi.org/10.1007/s10887-007-9010-6>
- BKPM. (2020). *Rencana Strategis BKPM*. Jakarta: Indonesia Investment Coordinating Board.
- Dixit, R., & Ghosh, M. (2013). Financial Inclusion for Inclusive Growth of India- A Study of Indian States. *International Journal of Business Management & Research*, 3(1), 147-156.
- Dwi, F., & Erlando, A. (2018). Model Inklusif Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Ketimpangan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). *Journal of Universitas Airlangga*, 1-15.
- Gustiwiguna, T. I. (2020). *Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Pada Negara Middle Income*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Haloho, D. R. (2019). *Analisis Kausalitas Inklusi Keuangan Dengan Pemerataan Pendapatan, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran di Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Hidayatinnisa, N., Fauziah, Trivena, S. M., & Aini, Y. N. (2021). The Effect of Financial Literacy and Financial inclusion on Economic Growth in Indonesia. *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Perbankan*, 7(2), 339-359. doi:<https://doi.org/10.21070/jbmp.v7i2.1539>
- Khoirunnisa, I. (2019). *Analisis Kausalitas Inklusi Keuangan Terhadap Pertumbuhan Inklusi di Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

- Kusuma, A. A., & Indrajaya, I. G. (2020). Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(5), 963-1199.
- Ningrum, D. K. (2018). Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Ketimpangan di Jawa Timur Periode Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 6(1), 1-16.
- Pangeran, & Subambang H. (2021). Indeks Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusi di Indonesia: Analisis Kausalitas Granger. *Jurnal Ekonomi Hukum dan Humaniora*, 3(3), 1-16.
- Park, C.-Y., & Mercado, R. V. (2015). Financial Inclusion, Poverty, and Income Inequality in Developing Asia. *ADB Economics Working Paper Series*, 1-25.
- Pratama, D. A. (2020). Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan, Ketimpangan, dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 9(2), 1-18.
- Sanjaya, I. M. (2014). *Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Senyo, P., & Osabutey, E. L. (2020). Technovation Unearthing Antecedents to Financial Inclusion through FinTech Innovations. *Technovation*, 98, 102155. doi:<https://doi.org/10.1016/j.technovation.2020.102155>
- Sheraphim, G. K. (2018). Pengaruh Tingkat Inklusi Keuangan, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Penanaman Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di 33 Provinsi di Indonesia Periode 2011-2016. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2), 1-22.
- Soetiono, K. S., & Setiawan, C. (2018). *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tsuroyya, I. (2022). *Pengaruh Inklusi Keuangan, PDB per Kapita, dan Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Negara Berpenghasilan Menengah Ke-atas dan Ke-bawah 2008-2019*. Jakarta: UIN Jakarta.
- Ummah, B. B., & Anggraeni, N. N. (2015). Analisis Inklusi Keuangan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 4(1), 1-27. doi:<https://doi.org/10.29244/jekp.4.1.2015.1-27>
- Waedhono, A., Indrawati, Y., & Qori'ah, C. G. (2018). *Inklusi Keuangan Dalam Persimpangan Kohesi Sosial dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. Jember: Pustaka Abadi.

Wahab, A., Qarina, Syariati, A., & Aprinandhi, M. D. (2022). Konstruksi Variabel Makroekonomi Terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia. *Al-Buhuts*, 18(1), 1-15. doi:<https://doi.org/10.30603/ab.v18i1.2599>

Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.